

BLOKADE ISRAEL TERHADAP KAPAL BANTUAN KEMANUSIAAN ANALISIS HUKUM INTERNASIONAL TERHADAP NEGARA BENDERA

ABSTRAK

Blokade maritim yang diterapkan Israel terhadap Jalur Gaza, termasuk pelaksanaan intersepsi terhadap Kapal Madleen di laut lepas pada tahun 2025, menimbulkan persoalan hukum mengenai legalitas tindakan tersebut berdasarkan hukum laut internasional dan hukum humaniter internasional. Kapal Madleen merupakan kapal bantuan kemanusiaan berbendera Inggris yang membawa bantuan berupa bahan pangan, obat-obatan, dan perlengkapan medis menuju Jalur Gaza. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis legalitas blokade maritim yang diterapkan Israel terhadap Kapal Madleen serta mengkaji upaya hukum yang dapat dilakukan oleh negara bendera dalam menanggapi tindakan tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum yang digunakan meliputi UNCLOS 1982, Konvensi Jenewa 1949, *San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea* 1994, serta berbagai literatur hukum internasional yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa blokade yang diterapkan Israel menimbulkan permasalahan hukum berkaitan dengan prinsip *freedom of navigation*, perlindungan terhadap kapal sipil dan bantuan kemanusiaan, serta kewajiban negara dalam menjamin akses bantuan kemanusiaan bagi penduduk sipil. Sebagai negara bendera, Inggris memiliki berbagai instrumen hukum internasional untuk memberikan perlindungan terhadap kapal yang mengibarkan benderanya melalui jalur diplomatik maupun mekanisme penyelesaian sengketa internasional. Dalam sengketa yang melibatkan berbagai rezim hukum internasional, *International Court of Justice* (ICJ) dapat menjadi salah satu alternatif penyelesaian apabila dasar yurisdiksinya terpenuhi karena memungkinkan penerapan berbagai sumber hukum internasional secara lebih komprehensif.

Kata Kunci: blokade maritim, negara bendera, kapal bantuan kemanusiaan

ISRAEL BLOCKADE OF HUMANITARIAN AID SHIPS: AN ANALYSIS OF INTERNATIONAL LAW ON THE ROLE OF FLAG STATES

ABSTRACT

Israel's naval blockade of the Gaza Strip, including the interception of the Madleen on the high seas in 2025, raises legal issues regarding the legality of these actions under international maritime law and international humanitarian law. The Madleen is a British-flagged humanitarian aid ship carrying food, medicine, and medical supplies to the Gaza Strip. This study aims to analyze the legality of Israel's maritime blockade of the Madleen and examine the legal remedies that flag states can take in response to these actions. This study is a normative juridical study using a statute approach, a conceptual approach, and a case approach. The legal materials used include UNCLOS 1982, the Geneva Conventions 1949, the San Remo Manual on International Law Applicable to Armed Conflicts at Sea 1994, and various relevant international legal literature. The research results show that the Israeli blockade raises legal issues related to the principle of freedom of navigation, the protection of civilian vessels and humanitarian aid, and the state's obligation to ensure access to humanitarian aid for civilians. As a flag state, the UK has various international legal instruments to protect vessels flying its flag through diplomatic channels and international dispute resolution mechanisms. In disputes involving various international legal regimes, the International Court of Justice (ICJ) can be an alternative resolution if its jurisdictional basis is met, as it allows for a more comprehensive application of various sources of international law.

Keyword: *naval blockade, flag state, humanitarian aid ships*